

MUHAMMAD SEBAGAI PEMIMPIN DA'WAH DAN NEGARA

<https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v7i1.228>

Submitted: 18-03-2024 Reviewed: 08-05-2024 Published: 24-06-2024

Imam Taufik Alkhotob

imamtaufik@stidnatsir.ac.id

STID Mohammad Natsir – Indonesia

Abstract

Secularistic leadership often distinguishes the worldly portion and the portion of Religion. The conception of religion as a teaching that comes down from the sky is often seen as the root of disaster in governing the plural human life. But in Islam, we actually see that the Prophet did not separate leadership in religion or da'wah, from leadership in the State. The two go hand in hand and become an exemplary model. This descriptive qualitative research based on literature study will examine and prove that the Prophet was not only a spiritual leader in da'wah, but also a leader who integrally led the affairs of the state. He was able to build a very ideal type of leadership that can also serve as a reference in the current context of life.

Keywords: *Da'wah, State, Daulah, Leadership*

Abstrak

Kepemimpinan sekularistik seringkali membedakan porsi keduniaan dan porsi Agama. Konsepsi tentang agama sebagai ajaran yang turun dari langit seringkali dipandang sebagai biang petaka dalam mengatur kehidupan manusia yang plural. Tapi dalam Islam justru kita melihat bahwa Nabi tidak memisahkan kepemimpinan dalam agama atau da'wah, dengan kepemimpinan dalam Negara. Keduanya berjalan secara baik dan menjadi keteladanan. Penelitian kualitatif deskriptif analisis berbasis studi kepustakaan ini akan mengkaji dan membuktikan bahwa Nabi bukan hanya pemimpin spiritual dalam da'wah, melainkan pemimpin yang secara integral memimpin urusan negara. Beliau telah mampu membangun tipe kepemimpinan yang sangat ideal namun juga dapat menjadi rujukan dalam konteks kehidupan saat ini.

Kata Kunci: *Da'wah, Negara, Daulah, Kepemimpinan*



PENDAHULUAN

Afzalur Rahman dalam bukunya *Muhammad As a Military Leader* memberikan sebuah ungkapan menarik tentang kedudukan Nabi Muhammad. sebagai sumber keteladan; *“Muhammad’s life provides a perfect example in every field of activity and his message is a source of guidance for mankind”*.¹ Afzalur Rahman sangat meyakini bahwa kehadiran seorang Nabi bernama Muhammad benar-benar telah membuka mata sejarah dan menyedot banyak perhatian. Betapa tidak, segala aspek dalam kehidupan beliau telah menjadi sumber inspirasi kehidupan di setiap lapangan aktifitas. Tidak hanya itu, Risalah yang dibawanya juga merupakan sumber pedoman hidup bagi kehidupan manusia.

Al Qur’an telah memuji aspek-aspek strategis dalam kehidupan Nabi dan merangkumnya dalam sebuah nama; *“uswah hasanah* (tauladan yang baik).” Allah berfirman;

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al Abzab: 21)

Imam Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsirnya bahwa ayat yang mulia ini merupakan *ashl al kabîr* (landasan utama) dalam mengikuti segala bentuk kehidupan Rasulullah baik perkataan, perbuatan, dan kepribadian Nabi secara menyeluruh.² Maknanya, jika seseorang ingin mencari teladan yang paripurna, maka pada diri Nabilah ia berada. Tak hanya itu, bahkan meneladani Nabi merupakan bentuk keinginan orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kebaikan hidup di akhirat kelak.

Universalisme Islam (*syumuliyah al Islâm*) yang menjadi karakteristik agama ini tidaklah lahir kecuali dari tauladan dan kepribadian Nabi yang dipotret dari banyak sisi. Inilah sebabnya, tidak mungkin seseorang memaknai Islam, memahami dan mengamalkan ajarannya jika ia tidak mampu melihat karakteristik

¹ Afzalur Rahman, *Muhammad As a Military Leader*, London: The Muslim Schools Trust London, 1980, hlm. 1

² Abi al Fida’ Isma’il ibn Katsir, *Tafsîr al Qur’ân al Adzhîm*, Beirut: Makatabah al ‘Ashriyyah, 2000, Jilid III, hlm. 443

kehidupan Nabi dari dimensi-dimensi yang ada. Salah satu dimensi yang akan menjadi bahasan pada tulisan kali ini adalah tentang peran dan posisi Nabi dalam meletakkan pondasi kehidupan sebuah negara, dimana beliau bertindak sebagai pemimpin da'wah dan negara sekaligus. Apa yang disebutkan oleh John L Esposito bahwa sejak kemunculannya di Arab Saudi (sekarang) Islam telah berkembang sebagai gerakan keagamaan dan politik yang didalamnya agama menyatu terhadap Negara dan masyarakat menjadi menarik untuk dibuktikan.³

Penelitian terdahulu tentang Muhammad dilakukan oleh banyak akademisi, bahkan di Barat semisal; Afzalu Rahman, (1980). *Muhammad As a Military Leader*, Afzal Iqbal (2000). *Diplomacy in Early Islam*, Akram Dhiyauddin Umari, (1999). *Madinah Society at the Time of Prophet; Its Characteristics and Organisation*, Muhammad Ahmad An Nadawi, (1935). *Da'wah ar Rasûl*. yang membahas posisi Nabi sebagai pemimpin dalam dakwah dan pemimpin dalam Negara. Dua kepemimpinan ini tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya. Bahkan kepemimpinan negara yang Nabi lakukan adalah bagian terpenting dalam proses da'wah Islam itu sendiri.

Penelitian ini mengkaji secara kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library reseach*). Penelitian ini ingin membuktikan melalui data kepustakaan bahwa keberadaan Nabi selaku pemimpin dalam da'wah adalah kepemimpinan dalam negara. Dimana Nabi berhasil membangun sebuah negara modern dimana beliau berada pada posisi strategis yang mengatur urusan agama dan negara secara sekaligus dalam satu kepemimpinan.

HASIL DAN DISKUSI

1. Negara; Sebuah Tinjauan Umum

Beberapa analisa tentang definisi Negara telah disebutkan oleh beberapa tokoh Barat berikut ini:⁴

- a. Roger H. Soltau: “Negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat.”

³ John L. Esposito, *Islam and Development*, terj. Sahat Simamora, Jakarta: Penerbit Rineke Cipta, 1990

⁴ A. Ubaidillah, *et. all, Pendidikan Kewarganegaraan; Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000, hlm. 48

- b. Harold J. Laski: “Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.”
- c. Robert M. MacIver: “Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa.”

Sementara itu Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa negara adalah, Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Dapat juga diartikan sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi dibawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat hingga berhak menentukan tujuan nasionalnya (tujuan yang lebih penting dari tujuan pribadi).⁵

Definisi yang disebutkan dalam Kamus Besar di atas selain mengidentifikasi dari sudut fungsional melainkan juga melihat dari karakteristik sebuah Negara. Begitu juga dengan definisi yang disebutkan para tokoh ilmuwan Barat di atas. Namun jika merujuk kepada rumusan Konvensi Montevideo tahun 1933, tentang unsure-unsur sebuah Negara, maka setidaknya kita akan mendapatkan batasan tentang arti sebuah Negara, apakah ia layak disebut sebagai sebuah tatanan kenegaraan ataukah bukan.

Unsur-unsur Negara yang disebutkan dalam Konvensi Montevideo ada tiga yaitu; penduduk, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat.⁶ Unsur-unsur ini disebut juga dengan unsure konstitutif. Penduduk atau warga Negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Wilayah adalah batasan territorial mencakup daratan maupun lautan bahkan dalam tatanegara modern menyangkut pula udara. Sementara pemerintahan yang berdaulat adalah kelengkapan Negara yang bertugas memimpin organisasi Negara

⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, hlm. 685

⁶ A. Ubaidillah, *et. all, Pendidikan Kewarganegaraan; Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000, hlm. 50

untuk mencapai tujuan Negara.⁷ Namun demikian, ketiga unsur ini tetap tidak dapat berjalan begitu saja, ia perlu ditunjang dengan unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional yang oleh Mahfud MD disebut dengan unsur deklaratif.⁸

Sesungguhnya untuk membaca apakah pada zaman Nabi telah ada pemerintahan ataukah belum maka penjelasan diatas dapat menjadi acuan. Meskipun demikian, pada era ini kita masih mendengar tuduhan-tuduhan miring mengenai peranan Nabi dalam meletakkan dasar-dasar kenegaraan yang dikonklusikan oleh para ulama sebagai Negara Islam. Sosok cendekiawan pluralis-sekuler semisal Gusdur adalah contohnya. Dalam memotret realitas sejarah Islam ia menyimpulkan bahwa; “Gagasan Negara Islam adalah sesuatu yang tidak konseptual, dan tidak diikuti oleh mayoritas kaum muslimin. Ia pun hanya dipikirkan oleh sejumlah orang pemimpin yang terlalu memandang Islam dari sudut institusionalnya belaka.”⁹

Apa yang disebutkan Gusdur pada buku “Islamku Islam Anda Islam Kita Semua” ini tampak tendensius menyerang sebuah fakta sejarah yang tak mungkin dihapus begitu saja. Bahkan tidak hanya itu, meyakini bahwa tiada ada Negara Islam dalam sejarah Islam berarti meniadakan peranan Nabi dalam membentuk tatanan pemerintahan. Lantas hendak dikemanakan sumber al Qur’an dan as sunnah yang berisikan data-data penting tentang batasan wilayah kaum muslimin, pemimpin tertinggi kaum muslimin, invasi dan pertahanan serangan kaum muslimin, pembuatan undang-undang, penegakkan hukum hudud, qishash, pengumpulan zakat, memerangi kelompok menyimpang (*murtaddin*), dan lain-lain yang semua itu berjalan dalam sistem pemerintahan.

2. Peranan Nabi dalam membangun Da’wah dan Negara

Secara umum penulis melihat bahwa da’wah Islam pada periode Makkah dan periode Madinah dapat dijadikan landasan untuk melihat tahapan-tahapan yang dilakukan Nabi dalam membangun masyarakat Islam dalam konteks Negara. Kedua periode itu telah

⁷ Tim ICCE UIN, *Civic Education; Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 45-47

⁸ *Ibid*, hlm. 45

⁹ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita Semua*, Jakarta: The Wahid Institute, 2006, hlm. 84

menggambarkan dengan jelas runtutan serta fase-fase turunnya wahyu yang diterima oleh Nabi yang sekaligus menggambarkan corak langkah beliau dalam mengemban perintah Allah, mewujudkan tatanan kehidupan yang diridhai-Nya.¹⁰

a. **Periode Makkah**

Periode ini dimulai sejak Nabi mendapatkan wahyu hingga diperkenannya hijrah ke Madinah. Karakteristik utama pada periode ini adalah penanaman pondasi kehidupan sebuah masyarakat dan Negara dengan landasan; *aqidah tauhid*. Landasan ini dapat dengan mudah dilihat dari wahyu yang turun dalam kelompok ayat-ayat Makkiah *mâ nazala qabla hijrah wa inkâna bi al madînah* (ayat-ayat yang turun sebelum hijrah meskipun ia turunnya di Madinah) serta sabda-sabda Nabi pada masa tersebut. Secara umum, Shofiyyurrahman al Mubarakfury dalam kitabnya *Ar Rahîq al Makhtûm* menjelaskan fase da'wah Makkiah kedalam tiga tahapan; 1) da'wah secara sembunyi-sembunyi selama tiga tahun, 2) da'wah dengan terang-terangan dimulai sejak tahun keempat kenabian hingga akhir tahun ke sepuluh, dan 3) tahapan da'wah di luar Makkah dan penyebarannya yang dimulai dari tahun kesepuluh hijriyah hingga hijrahnya nabi ke Madinah.¹¹

Jika dilihat dari marhalah da'wah sirriyah dan jahriyah di kota Makkah, maka persoalan yang paling ditentang oleh kafir Quraish adalah da'wah Nabi Muhammad yang tak henti-hentinya mengkritik kedudukan sesembahan-sesembahan mereka hingga mengancam eksistensi mereka baik secara individu maupun sosial. Inilah yang kemudian Parleman Kafir Quraish di *Darun Nadwah* berusaha memeras pemikiran mereka guna mencari cara untuk melenyapkan da'wah tersebut yang pada akhirnya berkesimpulan untuk membunuh Nabi.¹²

¹⁰ Lihat juga pendapat Sayyid Muhammad Nuh tentang regenerasi dalam Islam. Lihat, Aan Handriyani, *Communication Techniques Of Kh Najih Ahjad In The Court Of Da'i Pondok Maskumambang Islamic Boarding School*, Jurnal Da'wah, Vol 5 No 2 Tahun 2022, hlm. 92

¹¹ Shafiyyurrahman al Mubarakfury, *Ar Rahîq al Makhtûm; Bahts fî as Sirah an Nabawiyah 'ala Shâhibihâ Afdhal as Shalâh wa as Salâm*, Beirut: Dâr Ibn Hazm, 2002, hlm. 69

¹² Pada awalnya parlemen tersebut tidak berfikir akan ide untuk membunuh Nabi. Namun Abu Jahl menelurkan ide yang kemudian tak dikritisi oleh syaikh an najd (syaithan) yang telah membatalkan ide-ide sebelumnya.

Persoalan aqidah secara sensitif memang menyinggung banyak kalangan Arab Jahiliyah. Namun dari persoalan inilah Nabi memulai risalannya. Beliau faham betul bahwa tidak mungkin mendirikan sebuah tatanan kemasyarakatan yang monumental untuk sepanjang sejarah, jika tidak dimulai dengan sesuatu yang esensial yaitu aqidah. Pakar ilmu da'wah Abdul Karim Zaidan di dalam bukunya *Ushûl ad Da'wah* juga sejalan dengan arah pemikiran ini. Menurutnya, landasan peraturan (*nidzâm*) kehidupan bermasyarakat di dalam Islam terletak pada aqidah. Aqidah merupakan sentral pemikiran dan perilaku manusia dimana darinya ia dibangun dan ditegakkan. Mengenai hal ini, Abdul Karim Zaidan bahkan menyatakan wajibnya sebuah tatanan kehidupan untuk menjadikan aqidah Islam sebagai landasannya.¹³ Apa yang dikatakan Zaidan memang beralasan sangat kuat. Sebab tidaklah Allah Ta'âla mengutus setiap rasul-Nya kepada manusia tanpa terkecuali seluruhnya memulai gerakan dan memfokuskan diri pada pembangunan aqidah yang *shabîh*. Allah berfirman;

"Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku". (QS. Al Anbiya' : 25)

Di dalam tafsir *Taysîr Karîm ar Rahmân* Syaikh As Sa'di menjelaskan bahwa setiap rasul yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad dengan kitab-kitab yang mereka bawa seluruhnya bermuara pada suatu pokok risalah yaitu *al amru bi 'ibâdatillah wabdah lâ syarikalah* (perintah untuk mentauhidkan Allah serta tidak menyekutukannya), serta menjelaskan bahwa sesembahan yang memiliki *haq* untuk diibadahi dengan benar adalah Allah, kemudian peribadahan yang diperuntukkan kepada selainnya merupakan

Akhirnya parlemen tersebut sepakat untuk menyusun strategi pembunuhan terhadap Nabi dan syaikh an najd merasakan kepuasan mendalam. Lihat, Ibnu Hisyam, *As Sirah an Nabawiyah*, Beirut: Dâr Ihyâ' Turats al Islamy, 1997, Jilid II, hlm. 94-96

¹³ Abdul Karim Zaidan, *Ushûl ad Da'wah*, Iraq: Dâr al Wafâ', 1992, hlm. 104

kebathilan.¹⁴ Tokoh *Mujaddid* Muhammad bin Abdul Wahhâb *rahimabullâh* di dalam kitabnya *Kasyfu as Subuhât fî at Taubîd* menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan *taubîd* dalam da'wah para Nabi dan Rasul adalah mengesakan Allâh dalam hal ibadah, bukan sekedar meyakini akan keberadaan Allâh saja. Hal itu sebagaimana Râsulullâh ketika diutus kepada kaumnya yang telah melakukan berbagai bentuk ibadah seperti haji, bersedekah, berdzikir, dan bentuk peribadahan lainnya akan tetapi mereka masih menjadikan sebageian dari mahluk Allâh sebagai perantara untuk bertaqarrub kepada-Nya. Maka kedudukan diutusnya Rasûlullâh atas mereka adalah sebagai Rasul yang memperbaiki kembali agama nenek moyang beliau yaitu Nabi Ibrahim.¹⁵

Inilah aqidah yang menjadi pondasi setiap para Nabi dan Rasul dalam membangun masyarakatnya. Ini artinya, baik mereka yang diutus kedunia sebagai rakyat biasa seperti Nuh, Idris, Ibrahim, Musa, Isa atau mereka yang diberikan anugrah kerajaan seperti nabi Daud, nabi Sulaiman, dan lain-lain seluruhnya menggunakan aqidah tauhid sebagai landasan membangun masyarakat dan pemerintahan. Dalam bahasa yang agak sedikit berbeda, Abdurrahman Azzam dalam bukunya *The Eternal Message of Mohammad* menyimpulkan bahwa memang; *“The eternal message is based on two fundamentals: 1. Faith (iman), 2. Right doing (ihsan). From these its structure rises, from them it branches out, and on them must it belifes depend.”*¹⁶

Pada periode ini ada beberapa catatan sejarah menarik yang mencerminkan kegaitan da'wah Nabi sebagai seorang visioner sehubungan dengan pembentukan masyarakat beraqidah sebagai cikal bakal pemerintahan Islam.

- 1) Membangun markas intelektual, tarbiyah dan pengkaderan di rumah Arqam bin Abil Arqam al Makhzumi. Ini adalah tempat dimana Nabi menyampaikan Islam secara lebih

¹⁴ Abi Abdillah Abdirrahman bin Nashir bin ‘Abdillah bin Nashir Alu Sa’di, *Taisîr Karîm ar Rahmân fî Tafsîr Kalâm al Mannân*, Beirut: Dâr Ihyâ’ At Turâts al ‘Araby, 1999, hlm. 612

¹⁵ Syaikh Muhammad bin ‘Abdul Wahhâb, *Kasyfu as Syubuhât fî at Tauhîd*, Dimuraja’ah oleh As salayî Syahîd Muhammad Munîr ad Dimasyqî al Azharî, ttp, hal. 4

¹⁶ Abdurrahman Azzam, *The Eternal Message of Mohammad*, London: Quartet Books, 1979, hlm. 33

mendalam kepada para sahabat serta pembicaraan lainnya menyangkut strategi dan perjuangan da'wah Islam.¹⁷

- 2) Nabi menunjukkan ketegaran luar biasa dalam menolak setiap tawaran “damai” untuk tidak lagi menyebarkan ajarannya.
- 3) Nabi mencoba melakukan infasi da'wah ke Habasyah dengan mengutus sejumlah sahabat dibawah pimpinan sahabat Ja'far bin Abi Thalib ra.¹⁸ Sebagaimana analisa Abdul Qadir Abu Fariz, meski diterima oleh Raja Najasi, namun kondisi disana tidak memungkinkan untuk dikembangkan da'wah secara lebih agresif melihat kondisi internal kerajaan yang dikelilingi oleh Rabi-rabi Nashrani yang memegang kuat kepalsuan aqidahnya sementara raja tak mampu manampakkan keIslamannya. Disini para sahabat yang berjumlah 38 orang selama empat tahun bahkan tidak mendapatkan pengarus jumlah yang signifikan dari penduduk setempat untuk menerima da'wah Islam.¹⁹ Inilah yang membedakan Madinah dengan Habasyah
- 4) Nabi melihat Tha'if sebagai daerah alternatif. ketika itu Tha'if merupakan basis strategi bagi pemerintahan Quraisy. Bahkan kabilah Quraisy pernah berupaya untuk merangkul Tha'if ke pangkuannya dan mereka juga pernah masuk ke Wadi Waj karena di Wadi Waj itu banyak terdapat lahan perkebunan dan pertanian. Sehingga, ketika kabilah Quraisy khawatir terhadap suku Tsaqif, lalu mereka bersekutu dengan Bani Tsaqif serta dimasukkan juga ke dalam sekutu Bani Dhaus. Dahulu, mayoritas orang Kaya Makkah memiliki kekayaan di Tha'if dan mereka menghabiskan musim panas di sana. Tha'if adalah tanah arab yang paling subur dan menjadi perhatian dan ambisi.²⁰ Namun pada episode ini, da'wah dinegeri ini tidak mendapat sambutan baik, justru

¹⁷ Shafiyurrahman al Mubarakfury, *Ar Rahîq al Makhtûm; Bahts fî as Sirah an Nabawiyah 'ala Shâhibihâ Afdhal as Shalâh wa as Salâm*, hlm. 87

¹⁸ *Ibid*, hlm. 87-90

¹⁹ Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, *An Nidhâm as Siyâsi fî al Islâm*, Terj. Musthalah Maufur, Jakarta: Rabbani Press, 2000, hlm. 91-92

²⁰ Tijani Abdul Qadir Hamid, *Ushûl Fikr as Siyâsy fî al Qur'an al Makky*, Terj. Abdul Hayy al Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 198

sebaliknya Nabi mendapat kecaman dan perlakuan sangat buruk.²¹

- 5) Mengadakan strategi da'wah ke kota Madinah melalui *ahlul bai'ah* Aqabah pertama (*Syugra*) dan Bai'ah ke dua (*Kubra*).

2. Periode Madinah

Periode Madinah ditandai dengan momentum hijrahnya Nabi hingga beliau wafat. Pada periode inilah kita dapat menyebut bahwa Nabi telah membangun sebuah sistem pemerintahan baru dimana unsur-unsur Negara modern (penduduk, wilayah, dan pemerintahan berdaulat/hukum) terpenuhi. Bahkan dapat dipastikan sebagaimana disebut oleh Abdul Karim Utsman dalam *Nidham As Siyâsy fi al Islâm* bahwa berdasarkan nash al Qur'an dan sunnah serta referensi kitab *sirah Nabawiyah* dan referensi kontemporer bahwa Nabi telah mendirikan bentuk Negara Islam (*daulah Islâmiyah*)²². Para ulama ' bahkan tidak pernah berselisih tentang wajibnya pemerintahan Islam hingga khilafah Utsmaniyah di Turki berakhir.²³ Al Mawardi misalnya, berpendapat bahwa jika telah ada sekelompok orang yang menegakkan pemerintahan dan dengannya ia mengurus kehidupan kaum muslimin maka gugurlah kewajiban kaum muslimin yang lainnya (*fadhu kifayah*). Namun jika tidak, maka harus ada dua pihak yaitu 1) Dewan pemilih yang bertugas memilih imam bagi umat dan 2) Dewan imam yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam.²⁴

Para pakar sejarah modern telah membaca aktifitas Nabi pasca hijrah merupakan pekerjaan besar yang mengundang decak kagum. Karena dalam waktu yang relative singkat, Nabi bahkan

²¹ Ketika pulang dari Tha'if, diperjalannya nabi telah mengisalamkan seorang pemuda ahlul kitab bernama Addas. Selengkapnya lihat, Abi Fida' Isma'il bin Katsir, *Al Bidâyah wa an Nihâyah*, Beirut: Dâr al ma'rifah, 1999, Jilid III, hlm. 147

²² *Daulah Islam* atau *dâr al Islâm* adalah; Negara yang didalamnya dijalankan hukum Islam, serta kaum muslimin meyakini secara nyata. Lihat, Ali Abdul Halim Mahmud, *'Alamiyah ad Da'wah al Islâmiyah*, 'Iraq: Dâr al Wafâ', 1992, hlm. 387

²³ Abdul Karim 'Utsman, *An Nidhâm as Siyâsi fi al Islâm*, Beirut: Dâr al Irsyâd, 1968, hlm. 7

²⁴ Imam Al Mawardi, *Al Ahkâm As Shulthaniyah*, Terj. Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2007, hlm. 2-3

mampu membalik seluruh keadaan di Jazirah Arab menjadi bagian-bagian yang harus tunduk kepada ajaran Islam. Muhammad ‘Athiyah al Abrasy dalam bukunya *‘Adhzamah ar Rasûl Shallallâhu ‘alaihi wasallam* turut mengilustrasikan bahwa hijrah Nabi ke kota Madinah merupakan momentum besar dimana momentum tersebut telah menjadikan Islam tersebar begitu cepat ke seluruh Jazirah Arab. Bahkan setelah itu ia mampu tersebar kepada umat-umat lainnya dengan cepat, sebagaimana tak didapatkan dalam sejarah yang semisal dengannya.²⁵ Seorang pakar Islamisasi Ilmu pengetahuan seperti Isma’il al Faruqi dalam bukunya *The Hijrah; The Necessity of its Iqamat or Vergegenwärtigung* bahkan berpendapat bahwa; *“The most important aspect at the hijrah is its creation of the Islamic State.”*²⁶

Analisa lainnya juga datang dari Ramadhan Al Buthi dalam *Fiqh Sirah*, menyebutkan bahwa hijrahnya Nabi *salallâhu ‘alaihi wasallam* ke Yatsrib merupakan langkah awal dalam proses terbentuknya *“Dâr al Islâm”* (Negara Islam). Oleh karenanya, langkah awal yang Nabi lakukan untuk meletakkan asas-asas penting sebuah Negara adalah; *Binâ’ al masjid* (pembangunan masjid), *Al Mu’akahbah baina al muslimîn* (Mempersaudarakan diantara kaum muslimin), dan *Kitâbah watsîqah (dustûr)* (Membuat perjanjian).²⁷

Beberapa peran strategis Nabi yang menunjukkan aktifitas kepemimpinannya di kota Madinah dapat diuraikan dalam beberapa point penjelasan berikut ini:

a. Setibanya Nabi di Madinah, beliau disepakati secara kolektif oleh kaum muslimin sebagai pemimpin tertinggi bagi mereka.

Peran Nabi sebagai pemimpin spiritual juga secara bersamaan menampati posisi sebagai pemimpin politik. Indikasi-indikasi yang dapat dijadikan tolak ukur adalah; Nabi adalah pemegang tertinggi

²⁵ Muhammad ‘Athiyah al Abrasy, *‘Adhzamah ar Rasûl Shallallâhu ‘alaihi wasallam*, tt, Dâr al Qalam, 1965, hlm. 91

²⁶ Isma’il R. al Faruqi, *The Hijrah; The Necessity of its Iqamat or vergegenwärtigung*, Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia, 1981, hlm. 21. Al Faruqi kemudian menyebutkan kelebihan bentuk Negara Islam dengan bentuk yang lainnya tercermin dalam konsep-konsep berikut; *Universalism, Sovereignty, Freedom, dan Comprehensiveness.*

²⁷ Muhammad Ramadhan Al Buthi, *Fiqh as Sirah*, Dimasq: Dâr al Fikr, 1978, Jilid I, hlm. 151

keputusan. Hukum-hukum yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah dan antara sesama manusia baik sesama muslim maupun non muslim diputuskan berdasarkan hukum yang dibawa oleh Nabi berdasarkan ketetapan dari *As Syâri'* (Allah). Salah satu ayat yang menunjukkan keputusan hukum ada di tangan Nabi adalah;

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.” (QS. Al Ahzab: 36)

Di dalam tafsirnya Hamka menjelaskan bahwa surah Al Ahzab ini merupakan surah Madaniyah. dinamakan Ahzab (kelompok) karena memang dimuat di dalam surah ini cerita tentang sekelompok musuh-musuh Allah dan Rasul yang hendak menghancurkan Islam yang sedang tumbuh dengan baik di kota Madinah. mereka adalah orang-orang Kafir Quraish baik di dalam maupun diluar kota Makkah dan sekelompok Yahudi licik.²⁸ Mengenai ayat di atas, Hamka menjelaskan bahwa ayat diatas turun terkait tentang teguruan kepada sahabiyah Zainab binti Jahasy dan saudara laki-laknya Abdullah bin Jahasy yang menolak pilihan Nabi dalam jodoh hanya karena pandangan duniawi (tidak sekufu’) ya’ni kepada Zaid bin Haritsah. Namun setelah mendapatkan motivasi ayat di atas barulah mereka mengimani perkataan Nabi.²⁹

Semua hukum baik perdata maupun pidana yang menyangkut hubungan kemasyarakatan ketika itu dikembalikan kepada Nabi. Seperti; zina, minum khamar, murtad, qishash, hudud, hirabah (*terorisme*) dan lain-lain tidak diberikan kewenangannya secara personal kepada para sahabat, kecuali setelah mendapatkan persetujuan dari Nabi. Hal itu sepreti yang diperintahkan Nabi kepada sahabat Mu’az bin Jabal ketika diutus ke Yaman sebagai *qadhi*³⁰ untuk

²⁸ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007, Jilid VIII, hlm. 5624

²⁹ *Ibid*, hal. 5720

³⁰ Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa kapasitas Mu’az ra ketika itu adalah sebagai *qâdhi* atau *wali* (pengganti) Rasul untuk memutuskan perkara.

menyampaikan Islam dan memutuskan perkara dengan al Qur'an as sunnah dan berijtihad dengan dasar keduanya (HR. Abu Daud, Kitab *al Aqdhyyah* Bab *Ijtihād ar Ra'yi fī al Qadhā'*, No: 3592).³¹

Dalam membangun hubungan yang seimbang antara komunitas muslim dengan orang Yahudi misalnya, Nabi menelurkan apa yang dikenal dengan Piagam Madinah. Prof. Dr. Akram Dhiyauddin Umari menjelaskan bahwa para peneliti kontemporer memosisikan Piagam Madinah sebagai dasar studi mereka tentang reformasi yang dilakukan Rasulullah di Madinah. Tujuan dibentuknya konstitusi ini adalah dalam rangka menjelaskan komintan masing-masing kelompok Madinah dengan memberikan batasan hak-hak dan kewajibannya.³² Perjanjian yang termuat dalam sejumlah point itu berbicara tentang hubungan antara sesama kaum muslimin dan hubungan kaum muslimin dengan pihak Yahudi untuk bersama-sama menjaga kedaulatan Madinah.³³

b. Nabi mendirikan pusat pemerintahan dan informasi dengan masjid sebagai basisnya.

Ketika itu, selain sebagai tempat ibadah, tarbiyah, masjid juga sebagai tempat Nabi untuk membicarakan hal-hal strategis dan politis terkait dengan hubungan diplomatik antar wilayah (penerimaan delegasi), invansi dan pertahanan, bahkan masjid juga sebagai tempat dimana tawanan-tawanan perang dimukimkan, sehingga mereka melihat etika kehidupan Nabi dan para sahabat yang kemudian tidak sedikit dari mereka menerima Islam. Masjid juga sebagai tempat mukim orang-orang fakir yang memiliki keinginan keras belajar Islam seperti *ashab as suffah*, tempat latihan militer dan persiapan tempur, tempat pengadilan dan sengketa, pengobatan para korban perang,

Ibnu Qayyim, '*Aun al Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawūd*., Madinah: Nasr Muhammad bin Muhsin, 1969, Jilid IX, hlm. 509

³¹ Abi Dawud Sulaiman bin Asy'ab as Sijistany, *Sunan Abi Dawūd*, Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1998, hlm. 552-553

³² Akram Dhiyauddin Umari, *Madinah Society at the Time of Prophet; Its Characetritics and Organisation*, Terj. Mun'im A. Sirry, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm. 108-118

³³ Abi Fida' Isma'il bin Katsir, *Al Bidâyah wa an Nihâyah*, Jilid III, hlm. 239-240

dan lain-lain.³⁴ Dalam pandangan Sidi Gazalba masjid bahkan telah mengubah *gemeinschaft* (bentuk hubungan antar manusia) Arab yang berasaskan kesukuan menjadi *gemeinschaft* Negara Islam.³⁵

Sejumlah hadits yang menyebutkan wajibnya shalat berjamaah lima waktu bagi kaum muslimin menunjukkan fungsi masjid sebagai tempat ibadah mahdhah. Hadits-hadits yang menyebutkan khutbah-khutbah Nabi, nasihat-nasihat di pagi, sore dan malam hari di masjid menunjukkan fungsi masjid sebagai tempat tarbiyah. Hadits-hadits yang menyebutkan tentang musyawarah Nabi ketika hendak berperang di sejumlah peperangan yang Nabi ikuti kebanyakan diadakan di Masjid diikuti oleh para sahabat senior dan sahabat-sahabat lainnya. Kisah tentang tawanan perang dari Bani Hanifah bernama Stumamah bin Utsal yang kemudian masuk Islam dalam tiga kali jengukan nabi di Masjid Nabawi (Al Bukari no. 4372 *Kitab al Maghazy*, Bab *Wafdi bani Hanifah*).³⁶ Saad bin Muazh dalam perang Khandak juga terluk akibat serangan panah dari Habban bin Qais bin al Ariqah yang mengakibatkan urat dilengannya putus³⁷ dan dirawat di Masjid Nabawi.³⁸ Sementara itu, delegasi-delegasi perundingan damai yang pernah diterima Rasulullah banyak terjadi pada tahun ke 9 Hijryah. Diantaranya utusan dari Tha'if dua tahun sebelum Nabi wafat, utusan Bani sa'ad dipimpin Dimam bin Tsa'lab yang kemudian masuk Islam, utusan dari Kristen Najran terdiri dari enam orang, utusan dari Bani Thayyi Ady bin Hatim yang kemudian masuk Islam, beberapa utusan penyair yang datang secara kasar di dalam Masjid Nabawi berasal dari Bani Tamim dan Thaiif, dan lain-lain.³⁹

³⁴ Budiman Mustofa, *Manajemen Masjid*, Surakarta, Ziyad Visi Media, 2007, hlm. 25, Lihat juga, Ali Musthafa Yaqub, *Islaam Masa Kini*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 206

³⁵ Sidi Gazalba, *Mesjid; Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Antara, 1975, hlm. 114

³⁶ Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Al Bukhari, *Shahîh al Bukhârî*, Riyadh: Dâr as Salâm, 1997, hlm. 900

³⁷ Shafiyurrahman al Mubarakfury, *Ar Rahîq al Makhtûm; Bahts fî as Sirah an Nabawiyah 'ala Shâhibihâ Afdhal as Shalâh wa as Salâm*, hlm.300

³⁸ Sidi Gazalba, *Mesjid; Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, hlm. 120

³⁹ Afzal Iqbal, *Diplomacy in Early Islam*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2000, hlm. 49-69

- c. **Nabi mengatur urusan perekonomian masyarakat Madinah dengan sistem zakat, infaq maupun shadaqah yang didistribusikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan syari'at** (At Taubah: 60, 103, al Hajj; 41,).

Ketika Nabi tiba di Madinah, pasar Madinah ketika itu dimonopoli oleh sistem kapitalisnya Yahudi, dimana arus keluar masuk pasar dikendalikan secara strategis oleh mereka. Rasulullah kemudian membangun pasar muslim melalui tangan Abdurrahman bin 'Auf ra. Sahabat saudagar kaya yang menjadi salah satu pilar ekonomi kaum muslimin. Rasulullah juga melakukan pengawasan (*hisbah*) pada pasar dengan menunjuk penanggung jawab urusan tersebut kepada sahabat Said bin Said Ibnul 'Ash ra.⁴⁰

Demikian halnya, nabi juga menerapkan harta ghanimah (rampasan perang) sebagai kekuatan pendukung perekonomian pemerintahan dan perekonomian masyarakat, demikian halnya dengan jizyah (upeti dari wilayah-wilayah yang mengikat perlindungan dengan pemerintahan Nabi). Secara keseluruhan harta-harta tersebut diklasifikasikan dalam Baitul Mal secara terpisah. Seperti yang disebutkan oleh Sa'id Hawa dalam bukunya *Al Islâm*, bahwa pemerintahan Islam memiliki pusat keuangan Negara yang disimpan di Baitul Mal. Baitul Mal dibagi kedalam tiga kalsifikasi;⁴¹

- 1) Baitul Mal Khusus menyimpan harta zakat
- 2) Baitul Mal khusus sebagai hasil dari pemungutan *jizyah* dan *kharaj*
- 3) Baitul Mal yang khusus menyimpan harta *ghanimah* dan *rikaz*
- 4) Baitul Mal yang khusus menyimpan barang-barang yang tidak diketahui kepemilikannya

Satu hal yang belum pernah terjadi pada peradaban-peradaban lainnya adalah, Rasulullah mengubah sistem perekonomian dikala itu yang sarat praktek ribawi dengan segala bentuknya kemudian dihilangkan dan dihapuskan dengan sistem yang Ilahi (Islam).

⁴⁰ Ibnu Timiyah bahkan membicarakan secara khusus tentang persoalan mekanisme pasar dan regulasinya, ekspor-impor dan lain-lain berdasarkan ajaran Rasulullah dalam bukunya *Al Hisbah fi al Islâm*. Lihat. Ibnu Taimiyah, *Al Hisbah fi al Islâm*, Kairo: tp.tt, hlm. 76. Lihat dalam situs www.srcibd.com, Juni, 17-6-09

⁴¹ Sa'id Hawa, *Al Islâm*, Tt: Dirasah Manhajiyah Haula Utsûl al Stalastah, 1981, Jilid I, hlm. 150

Perdagangan dan jual beli tidak lagi monopoli si kaya atas si miskin. Pinjam meminjam, *musyarakah* atau *mudharabah* juga ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang adil lagi penuh maslahat serta menghilangkan kemudharatan-kemudharatan. Penghapusan sistem pajak sebagaimana terjadi di Negara-negara besar ketika itu (Romawi dan Persia) dengan sistem zakat, dan lain-lain.

d. Nabi bertindak memimpin sejumlah peperangan secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal ini seluruh peperangan diatur dan dimenej oleh Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi. Namun demikian sebagaimana yang terjadi dalam beberapa peperangan seperti Badr, Khandak, dan lain-lain masukan-masukan dari para sahabat juga diperhitungkan secara masak. Al Bukhari menyebutkan dari sejumlah periwayatan seperti dari Zaid bin Arqam ra, Al Barra ra bahwa Nabi bertempur secara langsung sebanyak 19 kali.⁴² Pertempuran-pertempuran tersebut secara mayoritas dimenangkan oleh Nabi. Ini menunjukkan betapa besarnya peran Nabi dalam mengatur, menempatkan, dan melakukan strategi peperangan secara brilian.

Menurut Mahmud Syed Khathtab bahwa sejarah kemiliteran Nabi dapat dibagi keadarn empat periode: mobilisasi, defensive, ofensif, dan konsolidasi.⁴³ Periode mobilisasi dimulai dari sejak pengangkatan menjadi Nabi hingga masa Hijrah. Pada periode ini Nabi membatasi diri dalam perang biasa, sambil mengumpulkan tenaga dan kekuatan. Sementara periode defensive dimulai dengan pengiriman pasukan kecil untuk membela aqidah sampai kepada penghancuran pasukan musuh dalam perang khandak di Mandinah. Dalam periode ini, jumlah pasukan kaum muslimin bertambah dan semakin terjaganya aqidah mereka dari rong-rongan. Kemudian periode ofensif dimulai sejak dari perang Khandak sampai usainya perang Hunain. Dengan selesainya periode ini Islam telah berkambang kesusuruh jazirah Arab dan kaum muslimin tampil sebagai kekuatan yang disegani. Terakhir, periode konsolidasi dimulai dari saat selesainya perang Hunain sampai wafatnya Nabi. Dengan

⁴² Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Al Bukhari, *Shahîh al Bukhârî*, hlm. 920-921

⁴³ EK. Imam Munawir, *Asas-asas Kepemimpinan dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional, tt, hlm. 189-190

selesainya periode ini, maka kekuatan kaum muslimin telah menjadi sempurna dan mencakup seluruh Jazirah Arab, serta bersiap-siap menyerbarkannya ke luar Jazirah Arab.

Jelas-jelas peperangan Nabi adalah pembelaan, penyebaran Islam, dan jalan untuk menjadikan *rahmatan lil 'alamin* menjadi benar-benar dirasakan.⁴⁴ Dr. Ramadhan Al Buthy juga menyebutkan bahwa; Jihad juga merupakan benteng pertahanan negeri Islam dan masyarakat Islam.⁴⁵ Oleh karenanya, segala bentuk peperangan yang dilakukan tidak lepas dari etika-etika Islam yang tak pernah ada dalam sejarah perang bangsa manapun seperti tersebut dalam hadits Sulaiman bin Buraidah ra (HR. Muslim, Kitâb *Al Jihâd wa as Sîr*, Bab *Ta'mîr al Imâm al Amrâ' 'ala al Bubûts wa Washiyah bi âdâb al Ghaẓwu wa Ghairihâ*)⁴⁶ bahkan hingga saat ini.

KESIMPULAN

M. Natsir menyimpulkan bahwa seluruh Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhamamd berpulang kepada tiga hal; 1. Menyempurnakan hubungan manusia dengan Khaliqnya, "*hablum minallah atau mu'amalah ma'a Khaliq*". 2. Menyempurnakan hubungan manusia dengan sesama manusia "*hablum minan nas*" atau *mu'amalah ma'a khalq*" 3. Mengadakan keseimbangan (*tawazun*) antara kedua itu dan mengaktifkan kedua-duanya sejalan dan berjalain.⁴⁷ Inilah yang kemudian menjadikan nilai perjuangan Nabi itu *rahmatan lil 'alamin*. Praktek Nabi dalam membentuk Negara juga harus dipandang dalam konteks tersebut. Sebab tujuan Negara adalah terealisasinya perintah Allah dan hukum-hukumnya yang berkonsekwensi kebaikan untuk seluruh makhluknya tanpa terkecuali.

Penulis melihat bahwa, jika dilihat dengan kaca mata Barat sekalipun, pengakuan kedaulatan Negara Islam di zaman Nabi adalah merupakan hal yang aksiomatis. Sejarah memperlihatkan bahwa sejak

⁴⁴ Muhammad Ahmad An Nadawi, *Da'wah ar Rasûl*, Mesir: Musthafa Al Bani Al Halaby, 1935, hlm. 419

⁴⁵ Ramadhan Al Buthy, *Al Jihâd fi al Islâm; Kaifa Nafham ? wa Kaifa Numâris*, Terj. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka An Naba' 2001, hlm. 89

⁴⁶ Abi Husain Muslim bin al Hajjaj bin Muslim, *Shahîh Muslim*, Riyadh: Dâr as Salâm, 1997, hlm. 768-769

⁴⁷ M. Natsir, *Fiqh Da'wah*, Jakarta: Media Da'wah, 2000, hlm. 36

Nabi di Madinah, seluruh wilayah Madinah diatur kedaulatannya dalam perjanjian-perjanjian strategis. Selain itu, jaminan kepemilikan, jiwa, peribadatan, dan lain-lain selangkah-demi selangkah menjadi semakin rapih. Hukum-hukum yang diberlakukan baik kepada internal kaum muslimin atau kepada orang-orang kafir semakin sempurna. Posisi Nabi sebagai pemimpin tertinggi kemudian diakui oleh seluruh wilayah kekuasaan dan rival yang ada. Dapat dipastikan, kerajaan-kerajaan besar dan kecil diluar pemerintahan Nabi seluruhnya mengakui eksistensi kepemimpinan tersebut. Terlebih lagi pasca *futuh makkah* (penaklukan kota Makkah) terjadi, negara super power Romawi dan Persia bahkan terkejut. Pasca keberhasilan perang Mu'tah misalnya, sejumlah kabilah-kabilah yang bersekutu dengan Romawi seperti Dumah, Tabuk, Ailah, Taima' Jarba' Adruj' dan lain-lain melepaskan diri dan bergabung bersama kaum muslimin. Bahkan sejak perang Tabuk terjadi, perbatasan Islam langsung berhadapan dengan perbatasan kekuasaan Romawi.⁴⁸

Sebagai kepala Negara, Rasulullah telah memberikan teladan begitu sempurna baik dalam kepemimpinan da'wah dan negara sekaligus. Semua aspek telah beliau tegakkan sendi-sendinya, prinsip-prinsipnya, aturan-aturannya, disertai batasan-batasannya. Tiga aspek yang disebutkan M. Natsir diatas terasa sangat lengkap untuk kemudian dapat dikembangkan dalam kehidupan modern saat ini. Hidup sebagai pemimpin sederhana, paling bertaqwa, berfikiran jernih, cemerlang dan cerdas, berakhlak sangar mulia, zuhud, berwibawa, adalah kelebihan yang tak mungkin lagi dijumpai hingga akhir zaman nanti. Beliau adalah satu-satunya prototype yang umat Islam diperintahkan untuk mendekati diri (mencontoh) kepada bentuk seperti itu.

⁴⁸ Shafiyurrahman al Mubarakfury, *Ar Rahîq al Makhtûm; Bahts fî as Sirah an Nabawiyah 'ala Shâhibihâ Afðhal as Shalâh wa as Salâm*, 424-433

DAFTAR PUSTAKA

- Rahman, Afzalur. (1980). *Muhammad As a Military Leader*. London: The Muslim Schools Trust London.
- Katsir, Abi al Fida' Isma'il ibn. (2000). *Tafsîr al Qur'ân al Adzhâm*. Beirut: Makatabah al 'Ashriyyah.
- Zaidan, Abdul Karim. (1992). *Ushûl ad Da'wah*. Iraq: Dâr al Wafâ'.
- Sa'di, Abi Abdillah Abdirrahman bin Nashir bin 'Abdillah bin Nashir Alu. (1999). *Taisîr Karîm ar Rahmân fî Tafsîr Kalâm al Mannân*. Beirut: Dâr Ihyâ' At 'Turâts al 'Araby.
- Wahid, Abdurrahman. (2006). *Islamku Islam Anda Islam Kita Semua*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Katsir, Abi Fida' Isma'il bin. (1999). *Al Bidâyah wa an Nihâyah*. Beirut: Dâr al ma'rifah.
- Mahmud, Ali Abdul Halim. (1992). *'Alamiyah ad Da'wah al Islâmiyah*. 'Iraq: Dâr al Wafâ'.

- 'Utsman, Abdul Karim. (1968). *An Nidhâm as Siyâsî fî al Islâm*. Beirut: Dâr al Irsyâd.
- Sijistany, Abi Dawud Sulaiman bin Asy'ab as. (1998). *Sunan Abî Dawûd*. Beirut: Dâr Ibn Hazm.
- Umari, Akram Dhiyauddin. (1999). *Madinah Society at the Time of Prophet; Its Characetritics and Organisation*. Terj. Mun'im A. Sirry. Jakarta: Gema Insani Press.
- Yaqub, Ali Musthafa. (2001). *Islam Masa Kini*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Al. (1997). *Shahîh al Bukhârî*. Riyadh: Dâr as Salâm.
- Iqbal, Afzal. (2000). *Diplomacy in Early Islam*. Terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Muslim, Abi Husain bin al Hajjaj bin. (1997). *Shahîh Muslim*. Riyadh: Dâr as Salâm.
- Azzam, Abdurrahman. (1979). *The Eternal Message of Mohammad*. London: Quartet Books.
- Mustofa, Budiman. (2007). *Manajemen Masjid*. Surakarta: Ziyad Visi Media.
- Depdikbud. (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Munawir, EK. Imam. (t.t.). *Asas-asas Kepemimpinan dalam Islam*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hamka. (2007). *Tafsir Al Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Gazalba, Sidi. (1975). *Mesjid; Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Mawardi, Imam Al. (2007). *Al Abkâm As Shulthaniyah*. Terj. Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah.
- Hisyam, Ibnu. (1997). *As Sirah an Nabawiyah*. Beirut: Dâr Ihyâ' Turats al Islamy.
- Faruqi, Isma'il R. al. (1981). *The Hijrah; The Necessity of its Iqamat or vergegenwartigung*. Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia.
- Qayyim, Ibnu. (1969). *'Aun al Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawûd*. Madinah: Nasr Muhammad bin Muhsin.
- Taimiyah, Ibnu. (t.t.). *Al Hisbah fî al Islâm*. Kairo.
- Esposito, John L. (1990). *Islam and Development*, terj. Sahat Simamora, Jakarta: Penerbit Rineke Cipta,

- Fariz, Muhammad Abdul Qadir Abu. (2000). *An Nidbâm as Siyâsi fî al Islâm*. Terj. Musthalah Maufur. Jakarta: Rabbani Press.
- Abrasy, Muhammad 'Athiyyah al. (1965). *'Adbzâmah ar Rasûl Shallahâbu 'alaihi wasallam*. Dâr al Qalam.
- Buthi, Muhammad Ramadhan Al. (1978). *Fiqh as Sîrah*. Dimasq: Dâr al Fikr.
- Nadawi, Muhammad Ahmad An. (1935). *Da'wah ar Rasûl*. Mesir: Musthafa Al Bani Al Halaby.
- Natsir, M. (2000). *Fiqh Da'wah*. Jakarta: Media Da'wah.
- Wahhâb, Muhammad bin 'Abdul. (t.t.). *Kasyfu as Syubuhât fî at Tauhîd*. Dimuraja'ah oleh As salayî Syahîd Muhammad Munîr ad Dimasyqî al Azharî.
- Buthy, Ramadhan Al. (2001). *Al Jibâd fî al Islâm; Kaijfa Naqham ? wa Kaijfa Numâris*. Terj. Abdul Ghofar. Jakarta: Pustaka An Naba'.
- Hawa, Sa'id. (1981). *Al Islâm, Tt: Dirasah Manhajiyah Hawla Utsûl al Stalastah*.
- Mubarakfury, Shafiyurrahman al. (2002). *Ar Rahîq al Makhtûm; Bahs fî as srah an nabaniyah 'ala Shâhibihâ 'Afdhal as Shalâh wa as Salâm*. Beirut: Dâr Ibn Hazm.
- Tim ICCE UIN Jakarta. (2003). *Civic Education; Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Hamid, Tijani Abdul Qadir. (2001). *Ushûl Fikr as Siyâsy fî al Qur'ân al Makeyy*. Terj. Abdul Hayy al Kattani. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ubaidilah, et. all. (2000). *Pendidikan Kewarganegaraan; Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press.